

EDISI : Senin, 19 Februari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media: *Warta Bali*

Kategori: *Prerareva*

Mencegah Konflik SARA Dipicu Pungutan Desa Adat *Desa Adat Banyuasri Parumkan Prerarem*

BULELENG - Munculnya polemik pungutan desa pakraman kepada krama, khususnya krama tamiu atau tamu (penduduk non hindu yang tinggal pada wilayah desa pakraman) membuat Kelian Desa Adat/Pakraman Banyuasri di Kelurahan Banyuari Kecamatan Buleleng mengelus dada dan mencari solusi terbaik. Bukan hanya agar tidak muncul gejolak dalam krama desa/tegak (penduduk beragama hindu, penyungsong kayangan tiga desa pakraman, red) tapi juga mencegah terjadinya konflik bernuasa suku agama dan ras (SARA) yang dipicu prerarem (putusan adat/pakraman). Paruman dilakukan bersama krama desa, untuk menyikapi kendala pemungutan dana punia/partisipasi sesuai hasil paruman sebelumnya," tandas Kelian Desa Adat Banyuasri, I Nyoman Mangku Widiassa, Minggu (10/2) sore saat memimpin paruman di Balai Desa Adat/Pakraman Banyuasri.

Pada paruman yang dihadiri



wb/karmaya

PARUM: Cegah konflik SARA Desa Pakraman Banyuasri kembali gelar paruman terkait pemungutan dana partisipasi kepada krama tamiu.

Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Buleleng I Dewa Nyoman Budarsa tersebut, Mangku Widiassa memaparkan kendala yang dihadapi prajuru adat dalam memungut dana punia, sumbangan partisipasi dari krama desa dan krama tamiu, terutama krama tamiu non hindu yang ada di wilayah Desa Adat/Pakraman Banyuasri. "Selaku Kelian Desa Adat Banyuasri, saya mohon maaf kepada krama, karena be-

lum maksimal melaksanakan hasil paruman, terkait pemungutan dana punia dan partisipasi dari krama, terutama dari krama tamiu," jelasnya.

Selain karena adanya penolakan, belum maksimalnya pemungutan dana dari sumber lain-lain yang sah sesuai Awig-Awig Desa Adat Banyuasri juga diakibatkan pemberian dana partisipasi yang tidak sesuai hasil paruman. "Ada juga krama tamiu

yang bayar, namun besarnya tidak sesuai hasil paruman," terangnya.

Ditandaskan Mangku, agar tidak menimbulkan gejolak internal krama desa, dan memicu konflik SARA maka prajuru adat telah memerintahkan kepada petugas pemungut dana punia dan partisipasi agar tidak disertai ancaman. "Karena sifatnya partisipasi, terutama kepada krama tamiu, sehingga berapapun yang diberikan agar diterima dengan suka cita dan ucapan terimakasih, jangan ada pemaksaan," tegasnya.

Sumbangan sukarela dari krama, diharapkan dapat menutupi kebutuhan dana dari kegiatan yang telah diputuskan pada paruman sebelumnya dan mencegah terjadinya konflik bernuansa SARA. "Sumbangan sukarela ini sesuai dengan motto kita segilik saguluk salunglung subayan-taka dalam membangun dan membesarkan Desa Adat/Pakraman Banyuasri," tandas Mangku dijawab setuju oleh seluruh krama yang hadir.

Menyikapi keputusan paruman tersebut, Ketua MMDP Buleleng I Dewa Nyoman Budarsa menyatakan salut dan mengapresiasi hasil paruman krama Desa Adat/Pakraman Banyuasri sebagai embrio bangkit dan penguatan lembaga Tradisional Hindu dalam mengelola Parahyangan, Pelemahan, dan Pawongan dengan Falsafah Tri Hita Karana. "Penguatan lembaga adat harus dilakukan, namun jangan berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Karena keberadaan Desa Pakraman adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya. Budarsa berharap, penguatan desa pakraman dilakukan tanpa paksaan/kekerasan.

"Yang harus dilakukan adalah gencarkan sosialisasi tentang desa pakraman, sebagai lembaga adat berfalsafah Tri Hita Karana," pungkasnya. (kar,ger)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BUL